



BUPATI KONAWE KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE KEPULAUAN

NOMOR 7. TAHUN 2018

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi dan mewujudkan kinerja yang optimal pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan, maka dipandang perlu menyusun Standar Operasional Prosedur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1030, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran

5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5415*);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587*) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679*);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah dan Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan;
11. Peraturan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Standart Operasional Prosedur Bagi Perangkat Daerah Di Lingkungan Kabupaten Konawe Kepulauan.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

2. Standar adalah suatu usaha memberikan ukuran yang dianggap baik dan sesuai bagi pemakai.
3. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP, adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan kegiatan dan/atau aktivitas yang bersifat rutin dan berulang-ulang bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.

## BAB II STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan SOP pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.
- (2) SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 3

SOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), menjadi pedoman pada Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.

## BAB III KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 4

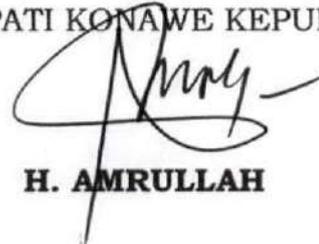
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.

PARAF KOORDINASI	
JABATAN	PARAF
1. SEKDA	
2. ASISTEN ADM. UMUM	
3. DINAS/BADAN/KANTOR	
4. BAGIAN	

Ditetapkan di Langara  
pada tanggal. 1 Maret 2018

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,



**H. AMRULLAH**

Diundangkan di Langara  
pada tanggal 2018

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN,

**LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KONAWE KEPULAUAN**

**NOMOR : 7 TAHUN 2018**

**TANGGAL : 1 Maret 2018**

**TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN**

**I. DAFTAR NAMA SOP (STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR) PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>NOMOR</b>
1	Perjalanan Dinas	001.1/01/I/Bappeda/2018
2	Pengelolaan Surat Masuk dan Keluar	001.1/02/I/Bappeda/2018
3	Penyusunan Renstra	001.1/03/I/Bappeda/2018
4	Penyusunan Renja	001.1/04/I/Bappeda/2018
5	Penyusunan RKA	001.1/05/I/Bappeda/2018
6	Penyusunan LAKIP	001.1/06/I/Bappeda/2018
7	Penyusunan RKPD Kabupaten	001.1/07/I/Bappeda/2018
8	Penyusunan Dokumen KUA dan PPAS	001.1/08/I/Bappeda/2018
9	Kerjasama Swakelola Penelitian	001.1/09/I/Bappeda/2018
10	Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IPM)	001.1/10/I/Bappeda/2018
11	Penyusunan Evaluasi RKPD	001.1/11/I/Bappeda/2018
12	Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	001.1/12/I/Bappeda/2018

**II. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN**